

RINGKASAN

Pemerintah Kabupaten Banyumas menyusun dan mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Banyumas karena beberapa hal. Hal-hal yang dimaksud adalah meningkatnya minat masyarakat Kabupaten Banyumas menjadi TKI, banyaknya permasalahan yang dihadapi TKI, dan sebagai pelaksanaan otonomi daerah di bidang ketenagakerjaan karena ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Kabupaten Banyumas. Berdasarkan perda tersebut, perlindungan calon TKI/TKI Kabupaten Banyumas bertujuan meningkatkan kesadaran, kepedulian dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banyumas, dunia usaha, dan masyarakat, untuk mewujudkan rasa aman, meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup TKI Kabupaten Banyumas dan keluarganya, serta terjaminnya pemenuhan hak-haknya baik pra penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Banyumas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*. Metode analisis data menggunakan model analisis interaktif. Sedangkan, validitas data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi Peraturan Daerah Banyumas Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan TKI Kabupaten Banyumas belum efektif. Hal tersebut karena hasil kebijakan/implementasi belum sesuai dengan tujuan kebijakan. Hasil kebijakan menunjukkan bahwa para *stakeholder* masih belum optimal dalam melaksanakan kewajibannya yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan TKI Kabupaten Banyumas, khususnya pada aspek pra dan purna penempatan di mana para informan tersebut bersentuhan langsung dengan pra dan purna penempatan. Pelaksanaan yang kurang maksimal pada kedua aspek tersebut menghambat pencapaian tujuan peraturan daerah tentang perlindungan TKI Kabupaten Banyumas.

Kata Kunci: efektivitas implementasi, peraturan daerah, perlindungan TKI

SUMMARY

The Banyumas Government formulated and implemented Regional Regulation Number 2 of 2015 on Protection of Indonesian Workers of Banyumas Regency because of several things. Those were increasing interest of the people in Banyumas to become TKI, the problems that TKI face, and as an implementation of regional autonomy in the manpower sector, in which manpower was one of the mandatory affairs of the Banyumas Government. Based on this regional regulation, the purpose of the protection of prospective TKI or TKI in Banyumas Regency was to increase awareness, concern and responsibility of the Banyumas Regency Government, the business world, and the community, to create a sense of security, improve welfare, quality of life of Indonesian Workers of Banyumas Regency and their families and ensure the fulfillment of their rights, from pre-placement, the period of placement, until after placement. The purpose of this research was to describe Implementation Effectiveness of Regional Regulation of Banyumas Regency Number 2 of 2015 on Protection of Indonesian Workers of Banyumas Regency.

The method used in this research is qualitative method. Data collection used with in-depth interviews, observation, and documentation methods. The selection of informant technique used purposive sampling. Data analysis method used interactive analysis. While validity of the data used triangulation techniques.

The results of the study showed the implementation of Regional Regulation of Banyumas Regency Number 2 of 2015 on Protection of Indonesian Workers of Banyumas Regency has not been effective. This was because the results of the policy / implementation were not in accordance with the policy objectives. The results of the policy showed that *stakeholders* were still not optimal in carrying out their obligations as regulated in the regional regulation, especially in the pre and post-placement aspects where the informants are in direct contact with pre and post-placement. The inadequate implementation of these two aspects inhibited the achievement of the objectives of the regional regulation on the protection of migrant workers in Banyumas Regency.

Keywords : Implementation Effectiveness, Regional Regulation, Protection of Indonesian Workers of Banyumas Regency